

# EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI *RESPONSIBILITY TO PROTECT* OLEH DEWAN KEAMANAN PBB PADA KONFLIK SIPIL LIBYA 2011

M. Chairil Umam<sup>1</sup> & Indra Pahlawan<sup>2</sup>

Muhammad.che.umam@gmail.com

*This research analyzes the effectiveness on implementation of the responsibility to protect the Libyan civil war by the UN Security Council. Since 2011, February 15, Gaddafi forces have committed systematic and organized crimes against humanity to the protesters causing civilian casualties in large numbers. Crimes against humanity in Libya shows the inability and unwillingness of the government for implementing the responsibility to protect civilians. This condition shows that Libyan government is not capable of running and breaking the concept of Responsibility to Protect. The UN Security Council has the authority in its capacity to take over the responsibility to protect the civilian population of Libya. The role of the Security Council is to implement the concept of Responsibility to Protect on Libyan civilians by stating resolution with number 1970 and 1973.*

**Keyword:** *Responsibility to protect, Crimes against humanity, Civil war, United Nation Security Council, United Nation Security Council Resolution.*

## Pendahuluan

Perang sipil Libya bermula dari demonstrasi terhadap penangkapan pengacara dan aktivis hak asasi manusia, Fathi Terbil, pada tanggal 15 Februari 2011. Demonstran memprotes penangkapan tersebut dan meminta Fathi Terbil dibebaskan. Rakyat Libya menuntut penegakan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi dalam pemerintahan. Aksi demonstrasi damai berubah menjadi aksi saling serang antara demonstran dan pasukan keamanan. Pasukan keamanan Libya menerapkan tindakan represif sehingga menyebabkan demonstran tewas dan terluka. Sejak tanggal 15 Februari, pemerintah Libya telah melakukan penggunaan kekuatan yang berlebihan yang menyebabkan penduduk sipil tewas dan terluka. Khadafi menggunakan pasukan keamanan dan tentara bayaran untuk melakukan penyerangan bersenjata, penculikan, penahanan, penyiksaan, penutupan akses medis, pemblokiran akses informasi dan kekerasan seksual secara sistematis terhadap penduduk sipil. *Human Rights Watch* menyatakan krisis politik Libya telah berada pada level perang sipil pada 24 Februari 2011.<sup>3</sup> Pasukan pro-Khadafi dan pasukan pemberontak telah melakukan serangan bersenjata yang terorganisir yang menewaskan ratusan jiwa penduduk sipil dan menimbulkan gelombang pengungsian yang sangat besar.

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan Khadafi merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) yang sistematis dan terorganisir. Terjadinya kejahatan kemanusiaan menunjukkan ketidakmampuan (*unable*) dan ketidakmauan (*unwilling*) pemerintah Libya melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil. Pemerintah Libya yang seharusnya bertanggungjawab untuk melindungi penduduk sipil sebaliknya menjadi pihak yang melakukan tindak kejahatan kemanusiaan pada penduduknya

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

<sup>3</sup> James Siebens dan Benjamin Case. Special Report-Summer. *The Libyan Civil War: Context and Consequences*. (THINK International and Human Security. 2012.) hal. 16 <<http://www.thinkihs.org/wp-content/uploads/2012/08/Siebens-Case-LibyaSReport-2012.pdf>>. [diakses pada 14 Januari 2013]

sendiri. Kondisi ini menunjukkan Libya tidak mampu menjalankan dan melanggar konsep *Responsibility to Protect*. Sesuai dengan konsep *Responsibility to Protect*, masyarakat internasional dapat melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil yang gagal dilakukan pemerintah Libya.

Dewan Keamanan PBB merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Dewan Keamanan mengimplementasikan konsep *Responsibility to Protect* untuk melindungi penduduk sipil Libya dengan mengeluarkan resolusi nomor 1970 dan 1973. Penetapan resolusi nomor 1970 menunjukkan Dewan Keamanan menggunakan pendekatan intervensi non-militer, sementara resolusi 1973 memperlihatkan peran Dewan Keamanan memberikan justifikasi intervensi militer ke Libya untuk melindungi penduduk sipil. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa efektivitas implementasi konsep *Responsibility to Protect* oleh Dewan Keamanan PBB pada perang sipil Libya 2011.

## Metode

Penelitian ini menggunakan tingkat analisa pengelompokan negara bangsa, dalam hal ini adalah PBB, lebih khusus lagi pada Dewan Keamanan PBB. Penggunaan tingkat analisa ini difokuskan pada kebijakan apa yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB serta bagaimana efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Penulis menggunakan teori peran *Intergovernmental Organizations* (IGO) untuk membahas tentang perilaku Dewan Keamanan PBB yang berperan mengimplementasikan *Responsibility to Protect* dalam intervensi kemanusiaan di Libya. *Intergovernmental Organizations* adalah organisasi yang beranggotakan pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi. Pembentukan IGO bertujuan untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan nasional bersama negara-negara anggotanya. *Intergovernmental Organizations* dibentuk secara global, regional maupun fungsional dengan cakupan peran yang luas maupun sempit. Peran Dewan Keamanan PBB dalam perang sipil di Libya terwujud dalam tindakan-tindakan yang didasari prinsip *Responsibility to Protect*. Dewan Keamanan mengimplementasikan konsep *Responsibility to Protect* untuk melindungi penduduk sipil Libya dengan mengeluarkan resolusi nomor 1970 dan 1973.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam resolusi nomor 1970 dan 1973, penulis mengidentifikasi tindakan implementasi yang dilakukan dengan indikator operasional konsep *Responsibility to Protect*, khususnya *Responsibility to React* yang diformulasikan ICISS.<sup>4</sup> Sudut pandang yang digunakan dalam menilai efektivitas tindakan-tindakan tersebut dinilai dengan dua perspektif utama yaitu perspektif *compliance* dan perspektif “*what’s happening and why?*”<sup>5</sup> Perspektif *compliance* menekankan pada kepatuhan terhadap berbagai aturan atau prosedur yang ada. Perspektif ini mengukur sejauh mana pihak-pihak tunduk pada aturan atau prosedur yang sudah digariskan, bertindak berdasarkan apa yang sudah ditentukan sebelumnya, termasuk pada batasan-batasan yang telah ditetapkan. Perspektif “*what’s happening and why?*” memusatkan perhatian pada penjelasan tentang apa yang terjadi dan mengapa terjadi. Perspektif ini berusaha melihat dan mengetahui bagaimana implementasi itu berjalan dan apa yang telah dicapai. Pada perspektif ini ada anggapan bahwa kebijakan yang dikatakan efektif implementasinya apabila kebijakan tersebut menghasilkan sesuatu yang telah dinyatakan sebagai tujuan-tujuan.

---

<sup>4</sup> ICISS, *The Responsibility to Protect*, (Ottawa: International Development Research Centre, 2001) hal. 29-38

<sup>5</sup> I Nyoman Sumaryadi. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. (Jakarta: Citra utama: 2005) hal. 109.

## Hasil dan Pembahasan

Kekerasan bersenjata yang mengakibatkan kematian ratusan warga sipil Libya merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Libya dibawah kepemimpinan Muammar Khadafi. Tindakan yang dilakukan pasukan pemerintah Libya melanggar hak asasi manusia yang diakui secara universal. Pemerintah Libya melakukan penggunaan senjata yang berlebihan sehingga menyebabkan penduduk sipil tewas, melakukan penyiksaan, penahanan, penculikan, penutupan akses medis, pembatasan penyebaran informasi dan tekanan terhadap pers. Masyarakat internasional mendesak PBB melakukan tindakan untuk mencegah meluasnya pelanggaran hak asasi manusia yang berpotensi menambah jumlah korban jiwa. Pada tanggal 21 Februari, Ibrahim Dabbashi, wakil Deputi permanen Libya untuk PBB beserta 12 diplomat Libya yang berada di New York meminta Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi rakyat Libya dan meminta organisasi-organisasi yang fokus terhadap hak asasi manusia menyelidiki pelanggaran yang terjadi di Libya.<sup>6</sup> Organisasi internasional seperti Uni Eropa, Liga Arab, Uni Afrika, GCC, dan OKI secara tegas turut mengutuk serangan yang tidak berperikemanusiaan tersebut. Organisasi-organisasi tersebut meminta Dewan Keamanan PBB bertindak menyelamatkan penduduk Libya dari pembunuhan massal yang dilakukan pemerintahnya.

Pada tanggal 25 Februari *Human Rights Council* menggelar pertemuan untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan pro-Khadafi. *Human Rights Council* mengutuk penyerangan yang dilakukan pemerintah Libya terhadap warga sipil dan memutuskan membentuk sebuah komisi independen untuk mengusut semua dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Libya. Pada pertemuan tersebut *Human Rights Council* membahas langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi konsekuensi atas tindakan yang dilakukan Khadafi. Pada hari yang sama, Abdurrahman Mohammed Shalgham selaku perwakilan Libya untuk PBB berpidato langsung di Dewan Keamanan PBB atas nama rakyat Libya. Mohammed Shalgham mengutuk tindakan Khadafi dan meminta dukungan konkret dari anggota Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan konflik.<sup>7</sup>

Permohonan Abdurrahman Mohammed Shalgham selaku perwakilan Libya untuk PBB dan Ibrahim Dabbashi selaku wakil Deputi permanen Libya untuk PBB menjadi pertimbangan utama bagi Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan intervensi. Berdasarkan desakan dan tuntutan masyarakat internasional, pada tanggal 26 Februari 2011, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang dan menetapkan Resolusi nomor 1970.<sup>8</sup> Seluruh anggota Dewan Keamanan PBB mendukung penetapan resolusi tersebut. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1970 tidak terlalu berpengaruh untuk mencegah tindakan agresif pasukan pro-Khadafi. Khadafi tetap melakukan tindakan kekerasan bersenjata yang mengakibatkan kematian warga sipil. Pasukan pro-Khadafi melakukan serangan-serangan tanpa membedakan target sipil atau pemberontak. Pasukan Khadafi menyerang menggunakan kekuatan militer konvensional seperti penggunaan senjata berat dan roket-roket. Kondisi tersebut membuat masyarakat internasional kembali meminta Dewan Keamanan PBB

---

<sup>6</sup> Max du Plessis dan Antoinette Louww. 2011. *Briefing Paper Justice and the Libyan crisis: the ICC's role under Security Council Resolution 1970*. Pretoria. Institute of Security Studies. <<http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/.../LibyaICCBrief.pdf>>, [diakses 14 Februari 2013]

<sup>7</sup> Isabelle Fischer. 2011. Master Thesis. *The French Leadership Towards the Intervention In Libya*. Aalborg University. hal 34. < [http://projekter.aau.dk/projekter/files/55993264/Isabelle\\_Fischer\\_Thesis.pdf](http://projekter.aau.dk/projekter/files/55993264/Isabelle_Fischer_Thesis.pdf) > [diakses pada 20 Desember 2012]

<sup>8</sup> United Nations Security Council. 2011. *Resolution 1970*. <[http://undocs.org/S/RES/1970\(2011\)](http://undocs.org/S/RES/1970(2011))>

mengeluarkan resolusi untuk mencegah bertambahnya korban masyarakat sipil Libya. Pada tanggal 12 Maret 2011, Dewan Liga Arab mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan situasi Libya. Pertemuan tersebut menghasilkan konsensus yaitu meminta Dewan Keamanan menerapkan zona larangan terbang untuk melindungi penduduk sipil Libya.<sup>9</sup>

Permintaan Liga Arab direspon dengan cepat oleh Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1973 pada tanggal 17 Maret 2011.<sup>10</sup> Pada proses pengambilan keputusan sepuluh anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi tersebut yakni Bosnia-Herzegovina, Kolombia, Gabon, Lebanon, Nigeria, Portugal, Afrika Selatan, Perancis, Inggris dan Amerika Serikat, sementara itu lima negara menyatakan abstain yaitu China, Rusia, Brazil, Jerman dan India. Resolusi 1973 menjadi justifikasi bagi masyarakat internasional untuk melakukan intervensi bersenjata ke Libya. Resolusi 1973 menyatakan masyarakat internasional dapat mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat sipil, “*Authorises Member States, acting nationally or through regional organisations or Arrangements.....to take all necessary measures to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack, including in Benghazi.*”<sup>11</sup> Resolusi 1973 menjadi justifikasi bagi masyarakat internasional untuk melakukan intervensi bersenjata ke Libya. Penetapan resolusi 1970 dan 1973 menunjukkan peran Dewan Keamanan PBB dalam mengimplementasikan konsep *responsibility to protect* untuk melindungi penduduk sipil Libya.

### **Ketidakefektifan Implementasi *Responsibility to Protect***

Tindakan yang dilakukan Dewan Keamanan berdasarkan pendekatan politik dan diplomatik adalah pemberlakuan sanksi politis. Melalui Resolusi nomor 1970, Dewan Keamanan memberlakukan larangan berpergian keluar negeri (*travel ban*) terhadap beberapa nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Libya. Dewan keamanan PBB meminta seluruh negara anggota mencegah 16 nama individu-individu yang terdaftar dalam resolusi 1970 masuk ke wilayah teritorialnya. Individu-individu yang mendapat sanksi *travel ban* adalah Khadafi beserta keluarganya dan pejabat tinggi Libya yang diduga melaksanakan perintah untuk melakukan kejahatan kemanusiaan. Pada tanggal 17 Maret 2012, Dewan Keamanan menambahkan 2 nama baru ditambahkan pada resolusi nomor 1973. Pada tanggal 24 Juni 2011, Dewan Keamanan kembali menambahkan dua nama individu yang mendapat sanksi *travel ban*. Dewan Keamanan total telah menetapkan 20 individu yang dikenai sanksi *travel ban*.<sup>12</sup>

Sanksi *travel ban* yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB dinilai tidak efektif. Beberapa negara anggota memberikan laporan telah melakukan implementasi usaha pencegahan individu yang dikenai sanksi *travel ban*, namun terdapat beberapa negara yang mengizinkan beberapa individu yang dikenai sanksi memasuki wilayahnya. Pada tanggal 29 Agustus 2011, perwakilan Aljazair untuk PBB melaporkan istri Khadafi, Safia Khadafi beserta tiga orang anaknya yaitu Aisha, Hannibal dan Mohammed Khadafi yang terdaftar dalam sanksi *travel ban* berada di Aljazair.<sup>13</sup> Pemerintah Aljazair menempatkan istri Khadafi

<sup>9</sup> Jeremiah Gertler, et all. 2011. *Operation Odyssey Dawn (Libya): Background and Issues for Congress*. Congressional Research Service. hal 6. <<http://fpc.state.gov/documents/organization/159790.pdf>>, diakses pada [diakses 16 Januari 2013]

<sup>10</sup> United Nations Security Council. 2011. *Resolution 1973*. <[http://undocs.org/S/RES/1973\(2011\)](http://undocs.org/S/RES/1973(2011))>

<sup>11</sup> *Ibid.*, ayat 4.

<sup>12</sup> List Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 1970 (2011) Concerning Libya. 2012. <<http://www.un.org/sc/committees/1970/pdf/List%20of%20Individuals%20and%20Entities.pdf>>, [diakses pada 23 Januari 2013]

<sup>13</sup> BBC News. 2012. *The Gaddafi clan: Where are they now?*. <<http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19966059>>, [diakses 24 Maret 2013]

dan anak-anaknya di sebuah vila di kota Staoueli. Dewan Keamanan PBB berhasil menemukan pelanggaran lain di Niger. Saadi Khadafi dikabarkan menyeberang ke Niger dan berada di Kota Niamey sejak tanggal 11 September 2011. Saadi diterima Niger sebagai pengungsi dan tinggal di rumah tamu negara di kota Niamey. Saadi melarikan diri dari Libya melalui gurun Sahara dengan bantuan pasukan militer pro-khadafi. Saadi Gaddafi dilaporkan melarikan diri ke Niamey menggunakan pesawat angkut militer dari kota Agadez yang berada di utara Niger.<sup>14</sup>

Beberapa individu yang melakukan perjalanan keluar dari Libya telah melanggar sanksi larangan perjalanan yang ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan. Aljazair dan Niger mengemukakan alasan kemanusiaan yang menjadi pertimbangan kedua negara tersebut untuk menerima individu-individu yang dikenai sanksi larangan perjalanan. Resolusi 1970 mengizinkan penerimaan individu yang terkena sanksi *travel ban* atas pertimbangan kemanusiaan. Ketentuan tersebut berlaku setelah negara penerima meminta izin dan mendapat persetujuan komite yang dibentuk Dewan Keamanan PBB. Niger dan Aljazair terbukti telah melanggar Resolusi 1970 karena mengizinkan individu-individu yang dijatuhi sanksi *travel ban* masuk ke wilayahnya atas dasar pertimbangan kemanusiaan tanpa mendapat persetujuan dari panel ahli yang dibentuk Dewan Keamanan PBB.

Tindakan yang dilakukan Dewan Keamanan berdasarkan pendekatan hukum dan konstitusi adalah penuntutan pidana. Dewan keamanan PBB memberikan mandat kepada *International Criminal Court* (ICC) untuk melakukan penyelidikan dan peradilan terhadap peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Libya sejak 15 Februari 2011. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970, ayat 7, menyebutkan ICC diminta untuk mendatangi Dewan Keamanan PBB dalam waktu 2 bulan dan 6 bulan setelahnya harus mengambil tindakan atas investigasi yang dilakukan. Tindakan awal yang dilakukan ICC sebagai respon atas mandat yang diberikan Dewan Keamanan adalah mengumpulkan bukti dan data-data mengenai kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Libya sejak masa demonstrasi dan perang sipil. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam fakta dan data tersebut kemudian dievaluasi dan dianalisa berdasarkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Statuta Roma.

Penunjukan ICC untuk melakukan investigasi dan penuntutan dilatarbelakangi terjadinya kejahatan kemanusiaan yang meluas dan sistematis dalam konflik Libya. Berdasarkan laporan pertama ICC kepada Dewan Keamanan PBB, ICC menemukan data dari berbagai sumber informasi yang kredibel bahwa diperkirakan terdapat 500-700 tewas tertembak selama bulan Februari. Pada tanggal 15 Maret, Khadafi memperkirakan hanya 150 atau 200 orang yang tewas dan setengah dari jumlah korban tersebut merupakan pasukan Keamanan Libya. Berdasarkan *Libyan Interim National Council* lebih dari 10.000 tewas dan lebih dari 50.000 terluka sejak awal konflik terjadi.<sup>15</sup> Pemerintah Libya melakukan berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti penggunaan kekerasan berlebihan yang mengakibatkan kematian, penganiayaan, penghilangan orang, penahanan, penutupan akses medis, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

ICC secara resmi mengumumkan memulai investigasi terhadap kasus Libya pada tanggal 3 Maret 2011. Sejak pengumuman investigasi hingga 26 April 2011, ICC telah membentuk 15 misi yang berasal dari 10 negara dan telah menghasilkan beberapa sumber data yang kredibel. ICC memiliki sumber data yang berasal dari hasil wawancara 45 orang narasumber yang kompeten untuk dimintai keterangan, lebih dari 569 dokumen yang terdiri

---

<sup>14</sup> BBC News. 2012. *Libya Unrest: Saadi Gaddafi 'in capital of Niger*.

< <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14909734> >, [diakses 24 Maret 2013]

<sup>15</sup> International Criminal Court. 2011 *First Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the UN Security Council Pursuant to UNSCR 1970*. hal. 4 <<http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A077E5F8-29B6-4A78-9EAB-A179A105738E/0/UNSCLibyaReportEng04052011.pdf>>, [diakses pada 14 Januari 2013]

dari laporan, foto dan video, serta sumber informasi terbuka (*open source information*).<sup>16</sup> Pelaksanaan investigasi yang dilakukan ICC didukung penuh oleh masyarakat internasional. Dewan Keamanan PBB dalam resolusi nomor 1970 meminta pemerintah Libya, organisasi regional dan internasional, dan negara-negara anggota PBB untuk memberikan bantuan yang diperlukan oleh ICC untuk mengusut investigasi tersebut.

Pada tanggal 27 Juni, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Muammar Khadafi, Saif al-Islam Khadafi, dan kepala intelijen Abdullah al-Senussi setelah menemukan bukti bahwa individu-individu tersebut bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan, penyiksaan dan kejahatan seksual.<sup>17</sup> Khadafi dituduh telah merencanakan dan melaksanakan pembunuhan, penganiayaan dan bentuk kejahatan kemanusiaan lainnya bersama orang-orang dekatnya, yaitu Saif al-Islam Khadafi dan Abdullah al-Senussi. Pada tanggal 4 Juli 2011, ICC mengajukan permintaan kepada pemerintah Libya untuk menangkap dan menyerahkan Muammar Khadafi, Saif al-Islam Khadafi dan Abdullah al-Senussi kepada ICC.<sup>18</sup> *National Transitional Council* sebagai pemerintah interim Libya memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas tersebut. Pada tanggal 20 Oktober, Muammar Khadafi tewas setelah ditangkap di Kota Sirte. Kematian Khadafi membuat proses hukumnya dihentikan sejak 22 November 2011. Pada tanggal 19 November 2011, Saif al-Islam Khadafi berhasil ditangkap pemerintah interim Libya di Zintan. Pemerintah interim Libya mengirimkan surat konfirmasi penangkapan kepada ICC pada 23 November 2011. Surat tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Libya akan membahas penyerahan Saif al-Islam Khadafi kepada ICC dan secara resmi memberitahukan hal tersebut saat keputusan dibuat. Pada hari yang sama pemerintah Libya mulai melakukan penyelidikan atas tindakan pidana, korupsi dan kejahatan keuangan lainnya yang dilakukan Khadafi. Pada tanggal 8 Januari 2012, Jaksa Agung Libya memulai suatu investigasi kejahatan berat diduga dilakukan oleh Saif al-Islam Khadafi selama demonstrasi dan perang sipil Libya 2011.

Abdullah al-Senussi berhasil ditangkap di Mauritania pada 17 Maret 2012. Pada tanggal 21 Maret 2012 pemerintah Mauritania memberikan jaminan kepada pemerintah Libya akan mengirim Abdullah al-Senussi ke Libya untuk menghadapi persidangan. Sejak saat itu Abdullah al-Senussi sakit dan kedua negara harus menunggu perkembangan kesehatannya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pengirimannya kembali ke Libya. Pasca kedatangan Pemerintah Libya ke Mauritania, pada tanggal 3 April 2012, Jaksa Militer Libya mengumumkan akan melakukan investigasi terhadap Abdullah al-Senussi terkait kejahatan kemanusiaan dan keuangan yang dilakukannya. Mauritania menyerahkan Abdullah al-Senussi pada 5 September 2012. Libya harus membayar 250.000.000 Dinar kepada pemerintah Mauritania untuk penyerahan tersebut.<sup>19</sup>

Pemindahan Abdullah al-Senussi dari Mauritania ke Libya telah melanggar hukum internasional. Kedua negara telah melanggar resolusi dewan keamanan PBB nomor 1970. Mauritania tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan Abdullah al-Senussi kepada ICC. Libya yang menahan Abdullah al-Senussi dan Saif al-Islam Khadafi melakukan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 5

<sup>17</sup> Alexis Arieff, et al. 2011. *International Criminal Court Cases in Africa: Status and Policy Issues*. Congressional Research Service, hal. 8, < <http://fpc.state.gov/documents/organization/158489.pdf>>, [diakses 14 Maret 2013]

<sup>18</sup> International Criminal Court. 2012. *Pre-Trial Chamber I, the Prosecutor v. Saif al-Islam Gaddafi and Abdullah al-Senussi*. hal.12.< <http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1405819.pdf>>, [diakses 14 Maret 2013]

<sup>19</sup> Ben Emmerson QC. 2013. *Request for Urgent Action Concerning Non-compliance by Libya with Security Council Resolution 1970*. < <http://vivalibya.files.wordpress.com/2013/01/doc1538907.pdf>>, [diakses 14 Maret 2013]

tindakan yang sama. Kedua negara tidak meratifikasi Statuta Roma, namun sebagai anggota PBB kedua negara harus mematuhi resolusi 1970 yang menyatakan Dewan Keamanan PBB memberikan yurisdiksi kepada ICC untuk mengadili kedua pelaku. Libya tidak mau menyerahkan Abdullah al-Senussi dan Saif al-Islam Khadafi kepada ICC. Pemerintah Libya menyatakan tidak akan menyerahkan Abdullah al-Senussi dan Saif al-Islam Khadafi kepada ICC karena pemerintah Libya meyakini mampu mengadili tersangka melalui pengadilan domestik.<sup>20</sup> Kondisi tersebut menyebabkan ICC tidak dapat melakukan peradilan dan otomatis menyebabkan penuntutan pidana yang dimandatkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC tidak efektif.

Tindakan yang dilakukan Dewan Keamanan berdasarkan pendekatan sosial dan ekonomi adalah pemberlakuan sanksi ekonomi. Pembekuan aset merupakan bentuk sanksi ekonomi yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB untuk mencegah rezim Khadafi menggunakan kekuatan finansialnya untuk mendukung tindakan kejahatan kemanusiaan. Dewan Keamanan PBB melalui resolusi nomor 1970 meminta negara-negara anggota untuk segera membekukan semua dana, aset finansial dan sumberdaya ekonomi lainnya yang berada di wilayah kedaulatan negara anggota yang dikontrol secara langsung atau tidak langsung oleh individu atau lembaga yang terdaftar dalam resolusi Dewan keamanan PBB. Resolusi nomor 1970 menetapkan 6 nama individu yang dikenai pembekuan aset. Penetapan nama-nama individu dan lembaga yang mendapat sanksi pembekuan aset di Libya sering mengalami perubahan. Resolusi nomor 1973 menetapkan 7 nama individu dan 5 lembaga yang dikenai pembekuan aset. Lembaga-lembaga keuangan tersebut yang dikontrol oleh Khadafi dan keluarganya. Profit yang didapatkan melalui lembaga-lembaga tersebut digunakan Khadafi sebagai sumber dana untuk mempertahankan rezim kekuasaannya.

Pada tanggal 24 Juni 2011, Dewan Keamanan kembali menambahkan 2 nama individu serta satu lembaga tambahan untuk pembekuan aset. Dewan Keamanan PBB mengurangi jumlah lembaga yang dibekukan asetnya pada tanggal 16 September 2011 melalui resolusi nomor 2009. Pada tanggal 16 Desember 2011, berdasarkan permintaan pemerintah Libya yang Dewan Keamanan menghapus dua lembaga dari daftar pembekuan aset sehingga menyisakan 2 lembaga yang dikenakan pembekuan aset parsial.<sup>21</sup> Sanksi pembekuan aset yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB direspon dengan cepat oleh negara anggota. Perintah pembekuan aset yang diberikan dewan keamanan PBB dalam resolusi yang dikeluarkannya telah dilaksanakan negara anggota dan organisasi-organisasi internasional. Muammar Khadafi diperkirakan memiliki 200 milyar dolar di rekening bank, real estate dan investasi pada perusahaan-perusahaan di seluruh dunia sebelum Khadafi meninggal.<sup>22</sup> Sebagian besar aset Khadafi dan keluarganya berada pada lembaga-lembaga keuangan yang dikenai sanksi embargo dalam resolusi nomor 1973. Pada tanggal 26 Februari 2011 Dewan Keamanan PBB telah membekukan sekitar 150 miliar dolar aset Libya yang sebagian besar berasal dari ekspor minyak dan berada pada rekening luar negeri.<sup>23</sup> Uni Eropa telah membekukan aset dua puluh tujuh orang dan empat puluh delapan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan Khadafi. Amerika Serikat menetapkan *Executive Order* mengenai pembekuan aset yang ditandatangani oleh Presiden Barack Obama. Amerika Serikat telah

---

<sup>20</sup> Kirkland Green. 2012. *The Libya Cases at the ICC and the Libyan Government's Admissibility Challenge*. AMICC <[http://www.amicc.org/docs/Libya\\_Challenge.pdf](http://www.amicc.org/docs/Libya_Challenge.pdf)>, [diakses 14 Maret 2013]

<sup>21</sup> UNSC. 2012. *Note by the President of the Security Council*. S/2012/163. hal. 50 <<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Libya%20S%202012%20163.pdf>> [diakses pada 5 Desember 2012]

<sup>22</sup> Luke T. Cadigan and Laura C. Prieston. 2011. *Returning Libya's Wealth*. The Fletcher Schools Tufts University. <<http://fletcher.tufts.edu/SWFI/~media/Fletcher/Microsites/swfi/pdfs/Libya.pdf>> [diakses pada 3 Maret 2013]

<sup>23</sup> *Ibid.*

membekukan 34 miliar dolar dari Libya sementara itu lebih dari 50 miliar dolar telah dibekukan di seluruh dunia.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan tugasnya yang tertera dalam paragraf 24 dan 25 resolusi nomor 1973, tim panel ahli yang dibentuk Dewan Keamanan PBB telah mengunjungi negara anggota, badan-badan PBB dan organisasi internasional lainnya untuk menjelaskan indikator dalam pembekuan aset yang telah dirancang. Berdasarkan laporan komite sanksi, total 55 negara anggota memberikan informasi tentang pelaksanaan sanksi, dan mengirimkan laporan atas tindakan telah dilakukan.<sup>25</sup> Dewan Keamanan PBB telah melaksanakan penegakan sanksi pembekuan aset dengan baik, berupa investigasi terhadap individu dan lembaga yang memiliki kedekatan dengan rezim Khadafi serta pembekuan aset secara langsung.

Kebijakan dan implementasi pembekuan aset Libya yang dilaksanakan Dewan Keamanan PBB tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi perang sipil Libya. Pembekuan aset Dewan keamanan PBB dilakukan terhadap deposito, jaringan investasi, dan aset perusahaan yang terdapat di dalam dan luar negeri, sementara itu Khadafi dikabarkan memiliki cadangan uang dalam bentuk tunai yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya. New York Times melaporkan bahwa intelijen Amerika dan negara asing lainnya memprediksi Khadafi memiliki simpanan uang tunai yang besar untuk membayar pasukannya, tentara bayaran, dan pendukung politiknya pada awal krisis terjadi.<sup>26</sup>

Khadafi memiliki sejumlah besar tabungan yang disimpan di *Libyan Central Bank* dan bank-bank lainnya yang berada di ibu kota. Sejak demonstrasi mulai membesar dan keadaan Libya semakin mencekam, Khadafi menarik uangnya dan mengumpulkannya di kamp Bab Al Azizia, Tripoli. Intelijen Amerika Serikat memprediksi Khadafi memiliki cadangan uang tunai 10 milyar Dolar yang dapat diakses di Libya. Cadangan uang tunai tersebut digunakan Khadafi untuk membiayai 3.000 hingga 4.000 tentara bayaran dari Mali, Niger dan Sudan. Setiap tentara bayaran mendapatkan minimal 1.000 Dolar per hari, namun jumlah pembayaran yang pasti tidak dapat dikonfirmasi.<sup>27</sup> Fakta ini menunjukkan pembekuan aset yang dilaksanakan Dewan Keamanan tidak efektif karena Khadafi masih mampu membiayai aktivitas militer untuk mempertahankan kekuasaannya.

Tindakan yang dilakukan Dewan Keamanan berdasarkan pendekatan militer adalah embargo senjata, penegakan zona larangan terbang dan operasi perlindungan terhadap penduduk sipil. Dewan Keamanan memberikan legitimasi bagi masyarakat internasional untuk menggunakan kekuatan militer untuk melindungi penduduk sipil dalam perang sipil Libya dengan mengeluarkan resolusi nomor 1973. Resolusi nomor 1973 berisi perintah untuk menegakkan zona larangan terbang, memperkuat aturan-aturan dalam embargo senjata dan perintah untuk melindungi penduduk sipil. Seruan memberikan perlindungan kepada penduduk sipil termuat dalam ayat keempat resolusi 1973 yang menyatakan bahwa setiap anggota PBB dapat mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk melindungi penduduk sipil Libya

Resolusi 1973 memberikan legalitas bagi masyarakat internasional untuk berperan langsung dalam usaha perlindungan penduduk sipil Libya. Amerika Serikat dan sekutunya menjadi pihak yang terdepan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Pada tanggal 19 Maret 2011 intervensi militer negara-negara asing di Libya dimulai dengan diumumkannya operasi militer, *Operation Odyssey Dawn*. *Operation Odyssey Dawn* merupakan nama

---

<sup>24</sup> Libya Outreach Group. 2011. Financial Report: LIBYA

<<http://gallery.mailchimp.com/5f65a9cec4e6a406f5ece6d57/files/Financial.pdf>>, [diakses 13 Maret 2012]

<sup>25</sup> UNSC. S/2012/163. *Op Cit.*, hal. 47

<sup>26</sup> James Risen dan Eric Lichtblau. 2011. *Hoard of Cash Lets Qaddafi Extend Fight Against Rebels*. New York Times < [http://www.nytimes.com/2011/03/10/world/africa/10qaddafi.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2011/03/10/world/africa/10qaddafi.html?_r=0) > [diakses 13 Maret 2012]

<sup>27</sup> *Ibid.*,

operasi militer koalisi antara Perancis, Amerika Serikat, Kanada dan Inggris. NATO mengambil alih kontrol semua operasi militer berdasarkan resolusi nomor 1970 dan 1973 pada 31 Maret. Operasi militer NATO dilaksanakan dengan nama *Operation Unified Protector* yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dan daerah pemukiman sipil dari serangan atau ancaman serangan.<sup>28</sup> *Operation Unified Protector* terdiri dari tiga elemen yaitu embargo senjata, penegakkan zona larangan terbang dan perlindungan terhadap penduduk sipil dari serangan atau ancaman serangan. Pada 31 Maret NATO mengumumkan operasi melindungi penduduk sipil sekaligus mengambil alih semua kontrol operasi militer di Libya.

Dewan Keamanan menetapkan sanksi embargo senjata untuk menghentikan terjadinya kekerasan bersenjata terhadap rakyat Libya dan melemahkan pemerintah Libya. Embargo senjata terhadap Libya ditetapkan dalam resolusi nomor 1970 dan diatur kembali dalam resolusi nomor 1973. Dewan Keamanan PBB meminta negara-negara anggota untuk mencegah masuknya suplai senjata secara langsung maupun tidak langsung melalui penjualan atau transfer ke wilayah Libya. Embargo mencakup usaha pencegahan terhadap masuknya senjata, suku cadang senjata (*spare part*), pemberian pelatihan militer dan penggunaan tentara bayaran. Pada resolusi nomor 1970 disebutkan sanksi embargo senjata tidak berlaku bagi pengiriman senjata untuk tujuan kemanusiaan.

Operasi pelaksanaan embargo senjata yang melibatkan koalisi negara-negara pada awalnya dipimpin oleh Amerika Serikat dalam *Operation Odysey Dawn*. Pada tanggal 23 Maret 2011, komando operasi maritim embargo senjata diambil alih oleh NATO Joint Forces Command Naples dibawah operasi *Operation Unified Protector*. Operasi tersebut dipimpin oleh Wakil Italia Laksamana Rinaldo Veri yang menjabat sebagai Komandan Komando Maritim Naples. Sebagian besar pelabuhan dan markas udara NATO berada di Italia karena posisi geopolitik Italia yang berhadapan langsung dengan garis pantai Libya. Berdasarkan laporan statistik akhir pelaksanaan *Operation Unified Protector*, area pengawasan operasi embargo maritim NATO mencakup sekitar 61.000 mil persegi wilayah laut. Lebih dari 3.100 kapal telah dihubungi oleh NATO, 300 kapal diloloskan memasuki wilayah Libya dan 11 kapal ditolak karena beresiko mengancam keamanan penduduk sipil. Operasi maritim tersebut tidak menemukan kasus pelanggaran embargo.<sup>29</sup>

Implementasi operasi maritim embargo senjata yang dilaksanakan NATO dinilai efektif, namun secara keseluruhan, embargo senjata terhadap Libya dinilai tidak efektif. Pelaksanaan embargo senjata yang dilakukan NATO hanya fokus dibagian utara Libya, tepatnya di sekitar Laut Mediterania sementara itu wilayah perbatasan darat kurang mendapat perhatian. Kelemahan pelaksanaan embargo senjata di Libya terletak pada lemahnya kontrol daerah perbatasan darat Sub-Sahara Libya yang berbatasan langsung dengan Tunisia, Aljazair, Niger, Chad, Sudan dan Mesir. Daerah tersebut merupakan jalur masuk tentara bayaran dan senjata illegal Khadafi. Tentara bayaran yang digunakan Khadafi sejak demonstrasi hingga berlangsungnya perang sipil berasal dari Niger, Chad, Mali dan Sudan. Sebagian tentara bayaran tersebut telah diintegrasikan kedalam pasukan militer Libya yang loyal kepada Khadafi. Juru bicara *Libyan Human Rights League* mengklaim 25.000 tentara bayaran beroperasi di Libya. Perbatasan Libya dan Aljazair merupakan jalur masuk ratusan pejuang Polisario ke Libya. Setiap pejuang Polisario mendapat bayaran 10.000 Dolar untuk menyeberang ke Libya dan diduga mendapat dukungan dari pemerintah Aljazair. Pejuang

---

<sup>28</sup> NATO. 2011. *NATO and Libya Operational Media Update for 10 June*. <[http://www.nato.int/nato\\_static/asets/pdf/pdf\\_2011\\_06/20110605\\_110605-oup-update.pdf](http://www.nato.int/nato_static/asets/pdf/pdf_2011_06/20110605_110605-oup-update.pdf)> [diakses 16 Januari 2013]

<sup>29</sup> NATO. 2011. *Operation Unified Protector NATO Final Mission Stats*.<[http://www.nato.int/nato\\_static/assets/pdf/pdf\\_2011\\_11/20111108\\_111107-factsheet\\_up\\_factsfigures\\_en.>](http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_11/20111108_111107-factsheet_up_factsfigures_en.>) [diakses pada 14 Desember 2012]

Suku Tuareg yang berasal dari Mali dan Niger juga didatangkan melalui perbatasan darat untuk mendukung pasukan pro-Khadafi dengan janji akan dibayar 1.000 Euro per hari. Perbatasan antara Libya dan Sudan termasuk wilayah masuknya tentara bayaran. Pasukan pro-Khadafi dikabarkan di dukung oleh tentara bayaran *Justice and Equality Movement* (JEM) yang berasal dari Sudan.<sup>30</sup>

Embargo senjata tidak menyulitkan pasukan pro-Khadafi karena Libya memiliki cadangan persenjataan di gudang-gudang senjata yang digunakan untuk menghadapi pemberontak. Pada masa penerapan embargo senjata, Libya dikabarkan mendapat pasokan dari pihak asing. *The Globe and Mail* mendapatkan dokumen yang menunjukkan Perusahaan Senjata milik negara di Cina menawarkan penjualan senjata dan amunisi senilai 200 juta dolar kepada Khadafi pada akhir Juli.<sup>31</sup> Senjata tersebut dipersiapkan untuk dibawa melalui jalur laut ke Aljazair dan Afrika Selatan untuk seterusnya dibawa ke Libya. Pemerintah Cina membantah kebenaran adanya penawaran tersebut dan berjanji memperketat pengawasan peredaran senjata. Mohamed Dahlan dan Mohamed Rashid yang berasal dari *The Palestinian Fatah Movement* diduga terlibat dalam penyelundupan senjata ilegal kepada pasukan Khadafi.<sup>32</sup> Dahlan membantah tuduhan terlibat dalam kesepakatan rahasia untuk memasok senjata buatan Israel dan mengatur pertemuan antara Saif al-Islam Khadafi dan pejabat Israel.

Dewan Keamanan PBB dalam resolusi nomor 1973 menyatakan larangan atas semua penerbangan di wilayah udara Libya dalam upaya melindungi penduduk sipil. Dewan Keamanan memberikan pengecualian terhadap penerbangan kemanusiaan yang bertujuan memberikan atau memfasilitasi pemberian bantuan obat-obatan, makanan, membawa pekerja kemanusiaan dan bantuan yang terkait, atau mengevakuasi warga asing dari Libya. Izin penerbangan diberikan pula kepada penerbangan yang bertujuan melindungi penduduk sipil dan mengimplementasikan sanksi zona larangan terbang. Penetapan zona larangan terbang oleh Dewan Keamanan PBB merupakan suatu langkah untuk meminimalisir jatuhnya korban penduduk sipil akibat serangan-serangan udara pasukan Khadafi yang tidak membedakan target sipil atau pemberontak.

Khadafi telah menggunakan kekuatan udaranya pada awal terjadinya krisis politik Libya dengan mengerahkan helikopter untuk menembaki demonstran. Pemberontakan yang semakin kuat dan terorganisir membuat Khadafi mengambil langkah yang lebih berani, yaitu menggempur basis-basis pemberontakan dengan jet-jet tempur Libya. Tujuan lain Dewan Keamanan menetapkan zona larangan terbang adalah guna memulihkan akses wilayah udara Libya sehingga menjamin keamanan penerbangan kemanusiaan. Berdasarkan penetapan zona larangan terbang dalam resolusi nomor 1973, Amerika Serikat dan pasukan koalisi yang tergabung dalam *Operation Odyssey Dawn* mulai mengimplementasikan penegakan zona larangan terbang di kota-kota besar dan pangkalan udara di sekitar pantai Libya pada 19 Maret 2011.<sup>33</sup> Operasi pengamanan zona larangan terbang yang dilakukan oleh koalisi dimulai dengan serangan terhadap aset-aset pertahanan udara Libya dan target lainnya menggunakan rudal kapal 110 Tomahawk dan Tactical Tomahawk. Pada waktu yang bersamaan, 3 unit pesawat pengebom B-2 Spirit dengan melakukan serangan dengan amunisi

---

<sup>30</sup> Varun Vira dan Anthony H. Cordesman. *The Libyan Uprising: An Uncertain Trajectory*. (Center for Strategic and International Studies. 2011) Hal. 26

<sup>31</sup> Graeme Smith. 2011. *China Offered Gadhafi Huge Stockpiles of Arms: Libyan Memos*. <<http://www.theglobeandmail.com/news/world/china-offered-gadhafi-huge-stockpiles-of-arms-libyan-memos/article1363316/>> [diakses pada 20 Maret 2013]

<sup>32</sup> Middle east monitor. 2011. *Fatah probes Dahlan and Rashid for supplying weapons to Gaddafi*. <<http://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/2220-fatah-probes-dahlan-and-rashid-for-supplying-weapons-to-gaddafi>> [diakses pada 20 Maret 2013]

<sup>33</sup> Jeremiah Gertler, *Op Cit.*, hal. 7

45 *Joint Direct Attack Munitions* (JDAMs). Inggris menembakkan rudal Tomahawk dari kapal-kapalnya yang berada di wilayah tersebut dan melalui serangan-serangan jet Tornado GR4 yang diterbangkan dari pangkalan udara Royal Air Force di Marham, Inggris.

Pada tanggal 20 Maret, pasukan koalisi kembali melakukan serangan-serangan besar atas pertahanan udara dan bandar udara Libya. Pasukan koalisi mengerahkan sejumlah besar pesawat seperti EA-18G Growler, AV-8B Harrier II, B-2 Spirit bombers, F-15E Strike Eagle, F-16C Fighting Falcon dan EC-130Js. Pada tanggal 23 Maret, Amerika Serikat mengumumkan bahwa *Operation Odyssey Dawn* berhasil melumpuhkan Angkatan Udara Libya.<sup>34</sup> Pertahanan udara Libya akhirnya tidak berdaya melawan kekuatan negara koalisi setelah lima hari penetapan larangan penerbangan. Bandar udara merupakan target utama serangan pasukan koalisi, seperti bandar udara Mitigia di Tripoli, Ghardabiya di Sirte, Al Jufra dan Bandar udara Sabah di tenggara Libya. Serangan pasukan koalisi menyebabkan bandara dan pusat kontrol komando rusak serta menghancurkan pesawat yang diparkir. Pengeboman pusat kontrol dan komando membuat jaringan komunikasi pasukan Khadafi tidak efektif. Pada tanggal 24 Maret pasukan koalisi menyetujui pengambil-alihan komando operasi udara oleh NATO. Pada tanggal 25 Maret, secara resmi NATO mengumumkan akan melaksanakan operasi untuk menjaga zona larangan terbang di Libya.<sup>35</sup>

Penegakan operasi zona larangan terbang yang dilakukan pasukan koalisi dan NATO berdasarkan resolusi nomor 1973 efektif menghancurkan kekuatan udara Libya. Serangan-serangan telah menghancurkan pertahanan udara, pusat kontrol-komando dan bandar udara Libya. Serangan tersebut mengakibatkan armada udara Libya lumpuh sehingga Khadafi tidak dapat menggunakan kekuatan udara. Kondisi tersebut menghilangkan ancaman terhadap penduduk sipil dari serangan udara Khadafi yang brutal dan tidak memilah-milah target serangan, namun serangan pasukan koalisi menambah jumlah kematian penduduk sipil karena serangan udara yang salah sasaran. Fakta tersebut menunjukkan bahwa implementasi penegakan zona larangan terbang tidak efektif, dalam hal ini bertentangan dengan tujuan utama misi yaitu untuk melindungi penduduk sipil.

NATO melaksanakan operasi militer dalam rangka melindungi penduduk sipil dari serangan atau ancaman serangan ke wilayah pemukiman penduduk. Gempuran serangan NATO menghancurkan basis-basis militer, bandar udara, kendaraan militer, senjata berat dan menewaskan pasukan Khadafi. Serangan militer besar-besaran yang dilakukan NATO sangat membantu usaha pemberontak untuk mengalahkan pasukan pro-Khadafi. Efek bantuan serangan militer NATO yang paling signifikan adalah keberhasilan pemberontak menguasai kota Tripoli pada akhir Agustus dan pada tanggal 20 Oktober pemberontak berhasil menewaskan Khadafi di kota Sirte.<sup>36</sup> Pasca kematian Khadafi *Operation Unified Protector* secara resmi dihentikan pada 31 Oktober 2011. Selama *Operation Unified Protector* berlangsung, operasi ini telah melibatkan sekitar 8.000 tentara, lebih dari 260 aset dan 21 aset angkatan laut.<sup>37</sup>

Selama tujuh bulan menjalankan operasi, NATO telah melakukan 25.944 serangan udara dan sekitar 70% serangan disertai dengan tembakan amunisi. Sebanyak 9.700 serangan dari keseluruhan jumlah serangan dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menetapkan target yang tepat, namun serangan untuk tujuan tersebut tidak selalu dilakukan dengan meluncurkan amunisi. NATO melaporkan telah menggunakan. Serangan-serangan

---

<sup>34</sup> James Siebens, *Op Cit.*, hal. 14

<sup>35</sup> NATO. *Operation Unified Protector Final Mission Stats. Op Cit.*

<sup>36</sup> Fabrizio Coticchia. 2011. *The 'enemy' at the gates? Assessing the European military contribution to the Libyan war.* Perspectives on Federalism, Vol. 3, issue 3, 2011. hal. 55

<sup>37</sup> *Ibid.*

NATO telah menghancurkan lebih dari 5.900 sasaran militer, termasuk lebih dari 400 artileri dan lebih dari 600 tank atau kendaraan lapis baja.<sup>38</sup>

*Operation Unified Protector* yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dinilai tidak efektif. Beberapa serangan NATO pada kawasan padat penduduk telah menyebabkan kematian penduduk sipil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan PBB, selama *Operation Unified Protector* berlangsung, NATO telah menewaskan sedikitnya 60 warga sipil dan melukai 55 orang lainnya.<sup>39</sup> Jumlah korban sipil tewas tersebut merupakan hasil penelitian 20 serangan udara dari total 9.970 serangan yang dilakukan dalam *Operation Odyssey Dawn* dan *Operation Unified Protector*. Lebih sederhananya, jumlah korban jiwa yang didapatkan PBB berasal dari penelitian 0,2% sampel serangan dari total keseluruhan jumlah serangan. PBB mengungkapkan lima dari dua puluh sampel serangan udara yang diteliti menyebabkan 60 penduduk sipil tewas dan 55 lainnya terluka atau rata-rata setiap 4 serangan udara menyebabkan 12 penduduk sipil tewas dan melukai 11 lainnya. Rasio rata-rata jumlah korban serangan berdasarkan hasil penelitian apabila dihitung dengan jumlah total serangan NATO dan pasukan koalisi maka diprediksi serangan dapat menewaskan hampir 30.000 penduduk sipil dan melukai 27.000 lainnya.

Serangan NATO yang banyak menewaskan penduduk sipil menjadi kontroversi dan disorot oleh masyarakat internasional, termasuk organisasi Human Rights Watch dan Amnesty International. Human Rights Watch berhasil mempublikasikan serangan udara NATO yang mengarah kepada pemukiman penduduk sipil di tujuh kota yang menyebabkan total 67 penduduk sipil tewas. Human Rights Watch menilai NATO tidak transparan dalam memberikan laporan mengenai jumlah korban dan kerusakan yang disebabkan oleh serangan udara. Human Rights Watch dan Amnesty International meminta NATO melakukan penyelidikan atas tewasnya warga sipil dalam serangan udara serta memberikan kompensasi kepada korban yang ditimbulkannya

## Simpulan

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa implementasi konsep *Responsibility to Protect* yang dilakukan Dewan Keamanan PBB di Libya dinilai tidak efektif dalam melindungi penduduk sipil Libya. Intervensi non-militer yang berbentuk penuntutan pidana dan *travel ban* dalam resolusi nomor 1970 tidak dipatuhi oleh beberapa negara anggota. Fenomena tersebut merupakan pelanggaran terhadap produk hukum yang dibuat Dewan Keamanan. Pelanggaran hukum tersebut menunjukkan tindakan yang diserukan oleh Dewan Keamanan untuk diimplementasikan tidak efektif. Pembekuan aset kepada Khadafi dan kroni-kroninya serta beberapa lembaga keuangan Libya yang berada dalam pengaruh Khadafi tidak memiliki efek yang cukup besar. Khadafi memiliki uang tunai dengan jumlah yang besar untuk membayar pasukannya, tentara bayaran dan membeli persenjataan meskipun aset-asetnya telah dibekukan. Dana tunai yang dimiliki Khadafi menjadi modal untuk mempertahankan kekuasaan, terutama untuk membiayai serangan-serangan militer yang menyebabkan tewasnya korban sipil.

Operasi militer *Operation Odyssey Dawn* dan *Operation Unified Protector* NATO yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dari serangan dan ancaman serangan merupakan suatu bentuk kamufase. Operasi militer NATO Libya lebih tampak sebagai usaha untuk mengganti rezim pemerintahan daripada memberikan perlindungan kepada penduduk sipil. Serangan NATO yang mengarah pada pemukiman dan menyebabkan kematian

<sup>38</sup> Human Rights Watch. 2012. *Unacknowledged Deaths Civilian Casualties in NATO's Air Campaign in Libya*. hal. 20.< <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/libya0512webwcover.pdf>> [20 Februari 2013]

<sup>39</sup> James Siebens, *Op Cit.*, hal.28

penduduk sipil menunjukkan serangan dilakukan tanpa memperhatikan prinsip *distinction and discrimination* yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Pada pelaksanaan operasi, NATO menggunakan senjata yang dapat menimbulkan kerusakan yang besar. Senjata yang digunakan NATO tidak spesifik untuk melumpuhkan target yang ditentukan. Serangan-serangan yang dilakukan NATO memperlihatkan tujuan untuk menghancurkan kekuatan Khadafi dan membuatnya terdesak. Usaha untuk melengserkan Khadafi membuat NATO tidak peduli serangannya menimbulkan korban penduduk sipil.

Fakta lain yang mendukung dugaan operasi militer bertujuan untuk mengganti rezim pemerintahan adalah NATO tidak menghalangi pemberian pelatihan militer dan pasokan senjata bagi NTC. Pasukan khusus Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Qatar dan Mesir memberikan pelatihan militer kepada pemberontak agar lebih terorganisir dan terlatih. Pemberontak juga dipersenjatai dengan peralatan tempur berat dari sejumlah negara. Negara-negara yang memberikan pasokan senjata dan pelatihan mengungkapkan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar embargo senjata karena bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil dan berada dibawah operasi NATO. Serangan-serangan NATO dan pemberontak berhasil membuat Khadafi terdesak, hingga akhirnya tertangkap dan tewas dibunuh pada 20 Oktober 2011. Sebelas hari setelah Khadafi tewas NATO mengumumkan operasi militer resmi dihentikan. NATO menghentikan operasi perlindungan ketika situasi keamanan belum pulih sepenuhnya, hal ini semakin memperkuat argumentasi bahwa tujuan tersembunyi yang menjadi misi utama operasi militer NATO adalah untuk mengganti rezim pemerintahan Libya yang otoriter sehingga nilai-nilai demokrasi barat dapat diterapkan di Libya.

### Daftar Pustaka

#### Buku:

Archer, Clive. 2001. *International Organization (Third Edition)*, London dan New York: Routledge

Department of Public Information United Nations. 2000. *Basic Facts About the United Nations*. New York: United Nation Publication

Evans, Gareth. 2008. *The Responsibility to Protect Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All*. Washington, D.C: Brookings Institution Press.

I Nyoman Sumaryadi. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra utama.

ICISS, 2001. *The Responsibility to Protect*. Ottawa: International Development Research Centre.

Rothchild, Donald, et al, 1996. *Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa*. Washington, DC: Brookings Institution.

#### Jurnal dan Working Paper :

Arief, Alexis, et al. 2011. *International Criminal Court Cases in Africa: Status and Policy Issues*. *Congressional Research Service*, <  
<http://fpc.state.gov/documents/organization/158489.pdf>>, [diakses 14 Maret 2013]

Coticchia, Fabrizio. 2011. *The 'enemy' at the gates? Assessing the European military contribution to the Libyan war*. Perspectives on Federalism, Vol. 3, issue 3, 2011.

Fischer, Isabelle. 2011. Master Thesis. *The French Leadership Towards the Intervention In Libya*. Aalborg University. <[http://projekter.aau.dk/projekter/files/55993264/Isabelle\\_Fischer\\_Thesis.pdf](http://projekter.aau.dk/projekter/files/55993264/Isabelle_Fischer_Thesis.pdf)> [diakses pada 20 Desember 2012]

Gertler, Jeremiah, et all. 2011. *Operation Odyssey Dawn (Libya): Background and Issues for Congress*. Congressional Research Service. <<http://fpc.state.gov/documents/organization/159790.pdf>>, diakses pada [diakses 16 Januari 2013]

Green, Kirkland. 2012. *The Libya Cases at the ICC and the Libyan Government's Admissibility Challenge*. AMICC <[http://www.amicc.org/docs/Libya\\_Challenge.pdf](http://www.amicc.org/docs/Libya_Challenge.pdf)>, [diakses 14 Maret 2013]

Hayes, Richard E. , et all. 2011. *NATO C2 in Libya: Coherence from Diversity*. Winna: Evidence Based Research.

Human Rights Watch. 2012. *Unacknowledged Deaths Civilian Casualties in NATO's Air Campaign in Libya*. <<http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/libya0512webwcover.pdf>> [20 Februari 2013]

International Criminal Court. 2011 *First Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the UN Security Council Pursuant to UNSCR 1970*. <<http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A077E5F8-29B6-4A78-9EAB-A179A105738E/0/UNSCLibyaReportEng04052011.pdf>>, [diakses pada 14 Januari 2013]

Libya Outreach Group. 2011. Financial Report: LIBYA <<http://gallery.mailchimp.com/5f65a9cec4e6a406f5ece6d57/files/Financial.pdf>>, [diakses 13 Maret 2012]

Luke T. Cadigan and Laura C. Prieston. 2011. *Returning Libya's Wealth*. The Fletcher Schools Tufts University. <<http://fletcher.tufts.edu/SWFI/~media/Fletcher/Microsites/swfi/pdfs/Libya.pdf>> [diakses pada 3 Maret 2013]

Max du Plessis dan Antoinette Louww. 2011. *Briefing Paper Justice and the Libyan crisis: the ICC's role under Security Council Resolution 1970*. Pretoria. Institute of Security Studies. <<http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/.../LibyaICCBrief.pdf>>, [diakses 14 Februari 2013]

Varun Vira dan Anthony H. Cordesman. 2011. *The Libyan Uprising: An Uncertain Trajectory*. Center for Strategic and International Studies: Washington D.C

#### **Situs Internet:**

BBC News. 2012. *Libya Unrest: Saadi Gaddafi 'in capital of Niger*. <<http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14909734>>, [diakses 24 Maret 2013]

BBC News. 2012. *The Gaddafi clan: Where are they now?*. <<http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19966059>>, [diakses 24 Maret 2013]

Ben Emmerson QC. 2013. *Request for Urgent Action Concerning Non-compliance by Libya with Security Council Resolution 1970*. <<http://vivalibya.files.wordpress.com/2013/01/doc1538907.pdf>>, [diakses 14 Maret 2013]

Graeme Smith. 2011. *China Offered Gadhafi Huge Stockpiles of Arms: Libyan Memos*.<<http://www.theglobeandmail.com/news/world/china-offered-gadhafi-huge-stockpiles-of-arms-libyan-memos/article1363316/>> [diakses pada 20 Maret 2013]

James Risen dan Eric Lichtblau. 2011. *Hoard of Cash Lets Qaddafi Extend Fight Against Rebels*. New York Times <[http://www.nytimes.com/2011/03/10/world/africa/10qaddafi.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2011/03/10/world/africa/10qaddafi.html?_r=0)> [diakses 13 Maret 2012]

Middle East Monitor. 2011. Fatah probes Dahlan and Rashid for supplying weapons to Gaddafi. <<http://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/2220-fatah-probes-dahlan-and-rashid-for-supplying-weapons-to-gaddafi>>[diakses pada 20 Maret 2013]

#### **Dokumen Resmi:**

International Criminal Court. 2012. *Pre-Trial Chamber I, the Prosecutor v. Saif al-Islam Gaddafi and Abdullah al-Senussi*.< <http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1405819.pdf> >, [diakses 14 Maret 2013]

List Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 1970 (2011) Concerning Libya. 2012. <<http://www.un.org/sc/committees/1970/pdf/List%20of%20Individuals%20and%20Entities.pdf>>, [diakses pada 23 Januari 2013]

NATO. 2011. *NATO and Libya Operational Media Update for 10 June*. <[http://www.nato.int/nato\\_static/asets/pdf/pdf\\_2011\\_06/20110605\\_110605-oup-update.pdf](http://www.nato.int/nato_static/asets/pdf/pdf_2011_06/20110605_110605-oup-update.pdf)> [diakses 16 Januari 2013]

NATO. 2011. *Operation Unified Protector NATO Final Mission Stats*.<[http://www.nato.int/nato\\_static/assets/pdf/pdf\\_2011\\_11/20111108\\_111107-factsheet\\_up\\_factsfigures\\_en.](http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_11/20111108_111107-factsheet_up_factsfigures_en.)> [diakses pada 14 Desember 2012]

United Nations Security Council. 2011. *Resolution 1970*. <[http://undocs.org/S/RES/1970\(2011\)](http://undocs.org/S/RES/1970(2011))>

United Nations Security Council. 2011. *Resolution 1973*. <[http://undocs.org/S/RES/1973\(2011\)](http://undocs.org/S/RES/1973(2011))>

UNSC. 2012. *Note by the President of the Security Council*. S/2012/163. <<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Libya%20S%202012%20163.pdf>> [diakses pada 5 Desember 2012]